

# **PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DESENTRALISASI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA)**

Yeni Solekhah, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Laif  
Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.  
Email : [yenisolekhah@yahoo.co.id](mailto:yenisolekhah@yahoo.co.id)

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh dari Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD kota Samarinda. Pada penelitian ini kinerja Manajerial berfungsi sebagai variabel dependen. Ada empat variabel yang berfungsi sebagai variabel independen, yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik. Jenis penelitian ini ialah pengujian Hipotesis yaitu penelitian yang biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji hipotesis (uji t dan f). Sampel dalam penelitian ini yaitu semua kepala sub pada SKPD bagian yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran dan data dikumpulkan melalui metode kuesioner.

Hasil penelitian ini bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja manajerial, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja manajerial, desentralisasi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja manajerial, dan akuntabilitas publik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan dari hasil uji simultan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik secara bersama-sama (simultan) berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah kota samarinda.

**Kata Kunci :** *Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, akuntabilitas publik, kinerja manajerial.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab yang telah diamandemen dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan nuansa baru dalam pemerintahan Indonesia, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Adanya reformasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap manajemen keuangan daerah.

Perubahan terhadap manajemen keuangan daerah, setidaknya memiliki dua alasan, yaitu: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (Good Governance) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang

harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik. Sebagai organisasi sektor publik yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah dituntut agar senantiasa memiliki kinerja yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

Keberhasilan organisasi sektor publik pemerintah yang baik memiliki tujuan dan kebijakan instansi yang ditetapkan ketika instansi berdiri. Untuk memudahkan pencapaian tersebut suatu instansi membutuhkan kinerja manjerial yang efektif dalam menjalankan organisasi sektor publik tersebut.

Kinerja merupakan hal yang penting untuk membantu memperbaiki dalam suatu organisasi sektor publik terhadap kinerja pemerintahan, karena kinerja merupakan tingkat pelaksanaan maupun perencanaan suatu kegiatan atau program untuk dapat membantu pemerintah yang berfokus pada tujuan dari misi dan visi yang berada dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kinerja sektor publik juga dilakukan dalam pengalokasian sumberdaya pada sebuah keputusan. Untuk mengetahui apakah kinerja itu efektif atau tidak maka perlu adanya perbandingan terhadap anggaran.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Apakah partisipasi penyusunan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda?
- b. Apakah kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda?
- c. Apakah desentralisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda?
- d. Apakah akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda?
- e. Apakah partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan struktur desentralisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda?

## **B. Dasar Teori**

### **1. Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Halim (2002:138) pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut : Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan. Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

### **2. Partisipasi Penyusunan Anggaran**

Nafarin (2007 : 11) menyatakan bahwa : Tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. Menurut Mulyadi (2001 : 513) menyatakan bahwa : Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti anggaran berarti keikutsertaan operating managers dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan ditempuh oleh operating managers tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran menyangkut suatu proses dimana individu-individu yang terlibat didalamnya yang mempunyai pengaruh penyusunan pada target anggaran. Partisipasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama yang akan membawa pengaruh pada masa yang akan datang bagi yang telah membuat keputusan.

Konsep anggaran memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada lingkup organisasi tertentu. Anggaran Negara merupakan suatu pernyataan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode waktu

dimasa yang akan datang, yang meliputi informasi pengeluaran penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa kini dan masa lalu.

### 3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Bastian (2006:255) Menentukan kejelasan sasaran anggaran tersebut telah disusun Kepala daerah berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahun menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA (Kebijakan Umum APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja dan pendanaannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran tersebut lazim disebut perencanaan dan pengendalian laba yaitu proses yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, kinerja suatu unit organisasi dinilai baik secara finansial.

### 4. Desentralisasi

Suwandi (2013:5), untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih rendah Organisasi yang terdesentralisasi adalah sebuah organisasi yang memiliki kebijakan bahwa pembuatan keputusan tidak dipusatkan di manajemen pusat, namun pembuatan keputusan disebar atau dilakukan oleh seluruh manajer pada

berbagai jenjang sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya.

### 5. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Mardiasmo (2006:5) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Mardiasmo (2004:226) akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), Akuntabilitas proses (*process accountability*), Akuntabilitas program (*program accountability*), Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

### 6. Kinerja Manajerial

Ferawati (2011:17) Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Dalam kamus akuntansi, kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai ukuran hasil yang sesungguhnya dari aktivitas sejumlah orang atau suatu badan usaha selama beberapa periode. Selain itu, kinerja adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perbankan. Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain.

Mulyadi (2001 : 415) kinerja manajerial adalah hasil secara periodic operasional suatu manajer berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial. Berbeda dengan kinerja karyawan umumnya

bersifat konkrit. Kinerja manajerial dilakukan dengan pengukuran terhadap hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh manajer organisasi atau kepala bagian dalam suatu unit kerja.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Samarinda. Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesejahteraan Sosial.

Penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 2 tahap yakni menentukan sampel SKPD yang berkaitan dengan penelitian terlebih dahulu dan selanjutnya menentukan responden dari SKPD tersebut sehingga proses penelitian ini dapat dilanjutkan.

Metode sampel yang digunakan dalam menentukan sampel SKPD yang berkaitan dengan penelitian adalah *purposive sampling* dimana sampel ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut terdiri atas :

- SKPD yang bersangkutan bersedia untuk terlibat dalam penelitian
- SKPD yang bersangkutan mengeluarkan anggaran pada tahun berjalan

### 2. Alat Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah model Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan aplikasi *software Statistical Program For Social Science (SPSS)* Versi 22. Analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.

- Uji validitas dan reabilitas
- Uji asumsi klasik
- Uji regresi linier berganda

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. ANALISIS

#### a. Uji Validitas

Pengujian validitas dapat menggunakan software statistik. Dimana Nilai validitas dapat

dilihat dengan menggunakan Corrected Item-Total Colleration. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka data dikatakan valid, dimana nilai sampel untuk  $r$  tabel 77 adalah 0,2242.

### Hasil Uji Validitas Kuesioner

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
partisipasi penyusunan anggaran	1	0.588	0.3291	Valid
	2	0.662	0.3291	Valid
	3	0.522	0.3291	Valid
	4	0.619	0.3291	Valid
kejelasan sasaran anggaran	1	0.649	0.3291	Valid
	2	0.699	0.3291	Valid
	3	0.725	0.3291	Valid
	4	0.752	0.3291	Valid
	5	0.737	0.3291	Valid
	6	0.664	0.3291	Valid
	7	0.81	0.3291	Valid
desentralisasi	1	0.759	0.3291	Valid
	2	0.693	0.3291	Valid
	3	0.576	0.3291	Valid
	4	0.816	0.3291	Valid
	5	0.752	0.3291	Valid
akuntabilitas publik	1	0.609	0.3291	Valid
	2	0.383	0.3291	Valid
	3	0.609	0.3291	Valid
	4	0.56	0.3291	Valid
kinerja manajerial	1	0.584	0.3291	Valid
	2	0.461	0.3291	Valid
	3	0.577	0.3291	Valid
	4	0.637	0.3291	Valid

Hasil uji validitas dari semua variabel pertanyaan kinerja manajerial, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik yang diajukan pada responden Menunjukkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid. Karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan sig 2-tailed  $<$  0,05.

#### b. Uji Reliabilitas

Pengujian Uji Reliabilitas data dapat dilihat dengan menggunakan Alpha Croanbach. Jika Alpha Croanbach  $>$  0,60 maka hasil pengujian data dinyatakan reabel dan tidak reabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

### Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach alpha	Nilai Minimum	Keterangan
----------	----------------	---------------	------------

		Cronbach Alpha	
partisipasi penyusunan anggaran	0.789	0.6	Reliabel
kejelasan sasaran anggaran	0.906	0.6	Reliabel
Desentralisasi	0.882	0.6	Reliabel
akuntabilitas publik	0.744	0.6	Reliabel
kinerja manajerial	0.764	0.6	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan semua variabel yang terdiri dari variabel Kinerja Manajerial, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Struktur Desentralisasi adalah reliabel karena alpha menunjukkan angka yang lebih dari 0,60.

### c. Pengujian Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat normalitas model regresi. Berdasarkan table uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37063094
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.099
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu 0.114 dan signifikan yaitu 0.200 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal.

#### 4) Uji Autokorelasi

#### 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai inflation factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.1

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.913	1.095
X2	.370	2.706
X3	.226	4.425
X4	.278	3.599

a. Dependent Variable: Y

Terlihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF diatas 10, dan nilai tolerance kurang dari 0.1. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

#### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.243	.066		3.674	.001
X1	.039	.084	.085	.471	.641
X2	.126	.126	.284	1.003	.324
X3	-.123	.156	-.284	-.785	.438
X4	.103	.154	.218	.667	.510

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

Perhitungan menggunakan uji Glejser terlihat nilai signifikansi variabel-variabel bebas antara lain partisipasi penyusunan anggaran 0.641, Kejelasan sasaran anggaran 0.324, desentralisasi 0.438 dan akuntabilitas publik 0.510 di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas.

Adapun hasil dari uji auto korelasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.265 <sup>a</sup>	.070	-.050	.39382	2.361

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil hitung Durbin Watson sebesar 2,361 sedangkan dalam tabel DW untuk k=4 dan N=36 besarnya DW-Tabel : dl (batas luar) = 1,3855, du (batas dalam) = 1,7218, kemudian dilakukan pengambilan keputusan dengan ketentuan  $4 - du < d < 4 - dl$  ( $2,2782 < 2,361 < 2,6145$ ), dimana  $4 - du$  ( $4 - 1,7218 = 2,2782$ ),  $4 - dl$  ( $4 - 1,3855 = 2,6145$ ), maka hasil menyatakan tidak ada keputusan.

## 5) Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.723	.143		.000
	X1	-.119	.180	-.120	.512
	X2	-.193	.271	-.203	.481
	X3	-.087	.336	-.094	.798
	X4	.116	.332	.114	.730

a. Dependent Variable: Y

## 6) Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variable dependen secara silmutan, pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel.

ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	.364	4	.091	.587
	Residual	4.808	31	.155	
	Total	5.172	35		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

Hasil pengolahan data uji F menunjukkan nilai F hitung = 0,587 dan signifikan pada level 0,675. Sedangkan nilai F tabel yaitu 2,69. Jadi, F hitung < F tabel yaitu  $0,587 < 2,69$  dan sig.  $0,675 > 0,05$ . Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik secara bersama-sama atau secara silmutan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. Jadi, hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

## E. PEMBAHASAN

Uji t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.723	.143		.000
	X1	-.119	.180	-.120	.512
	X2	-.193	.271	-.203	.481
	X3	-.087	.336	-.094	.798
	X4	.116	.332	.114	.730

a. Dependent Variable: Y

### 1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) terhadap Kinerja Manajerial (Y)

Pada hasil persamaan regresi 1 untuk menjawab hipotesis 1 dengan jumlah 4 indikator menunjukkan bahwa adanya hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan t hitung < t tabel, yaitu  $0,258 < 2,042$  dan nilai singnifikansi  $0,512 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran (X1) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. “Bahwa partisipasi penyusunan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

kinerja manajerial SKPD kota Samarinda” dinyatakan **Ditolak**.

## **2. Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran (X2) terhadap Kinerja Manajerial (Y)**

Pada hasil persamaan regresi 2 untuk menjawab hipotesis 2 dengan jumlah 7 indikator menunjukkan bahwa adanya hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung  $< t$  tabel, yaitu  $0,713 < 2,042$  dan nilai signifikansi  $0,481 > \alpha 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X2) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, sehingga hipotesis yang menyatakan “Bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda” dalam penelitian ini dinyatakan **Ditolak**.

## **3. Pengaruh Desentralisasi (X3) terhadap Kinerja Manajerial (Y)**

Pada hasil persamaan regresi 3 untuk menjawab hipotesis 3 dengan jumlah 5 indikator menunjukkan bahwa adanya hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung  $> t$  tabel, yaitu  $0,258 < 2,042$  dan nilai signifikansi  $0,798 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa struktur desentralisasi (X3) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, sehingga hipotesis yang menyatakan “Bahwa desentralisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda” dalam penelitian ini dinyatakan **Ditolak**.

## **4. Pengaruh Akuntabilitas Publik (X4) terhadap Kinerja Manajerial (Y)**

Pada hasil persamaan regresi 4 untuk menjawab hipotesis 4 dengan jumlah 4 indikator menunjukkan bahwa adanya hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung  $> t$  tabel, yaitu  $0,258 < 2,042$  dan nilai signifikansi  $0,798 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa struktur desentralisasi (X3) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, sehingga hipotesis yang menyatakan “Bahwa akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD

kota Samarinda” dalam penelitian ini dinyatakan **Ditolak**.

## **5. Pengaruh Patisipasi Penyusunan Anggaran (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Desentralisasi (X3) dan Akuntabilitas Publik (X4) Terhadap Kinerja Manajerial (Y)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ,  $F$  hitung  $< F$  tabel yaitu  $0,587 > 2,69$  dan  $\text{sig. } 0,675 > 0,05$ . Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik secara bersama-sama atau secara silmutan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. Sehingga hipotesis yang menyatakan “Bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda” dalam penelitian ini dinyatakan **Ditolak**.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- a. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda.
- b. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda.
- c. Desentralisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda
- d. Akuntabilitas publik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda.
- e. Partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas publik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD kota Samarinda.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Responden perlu diberitahukan untuk tidak memberikan jawaban dari kuesioner yang diisi hanya berdasar persepsi mereka namun berdasar kenyataan yang ada, serta memperjelas instrumen pertanyaan sehingga tidak menimbulkan respon biasa.
2. Bagi penelitian mendatang hendaknya daerah penelitian lebih diperluas.
3. Bagi penelitian mendatang hendaknya menambah variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja manajerial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang Melahirkan Nuansa Baru dalam Pemerintah Indonesia*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Galuh Ferawati. 2011. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Hansen dan Mowen. 2004. *Manajemen Biaya*. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- M. Nafarin. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2008. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2003. *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Suwandi, Annisa Pratywi. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap kinerja pemerintah daerah SKPD kota Padang*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang